

Analisis Tingkat Kekotaan Wilayah Kabupaten Sorong Berdasarkan Jumlah Fasilitas Sosial Ekonomi

Urban Level Analysis Based on Number of Socio-Economic Facilities Sorong Regency

Slamet Widodo¹, Murni^{2*}, Murshal Manaf¹, Rahmi Ariani Salam², Usiyani Rahayu²

*Email: murniums@gmail.com

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa

²Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sorong

Diterima: 14 Oktober 2022 / Disetujui: 30 Desember 2022

ABSTRAK

Sebagai wilayah yang sedang berkembang, Distrik Aimas sebagai Ibukota wilayah Kabupaten Sorong memiliki tantangan tentang masalah kesenjangan dan ketidakmerataan pembangunan fasilitas sosial ekonomi, sehingga penentuan tingkat kekotaan sekaligus wilayah dengan potensi sebagai sentral perkembangan fasilitas sosial ekonomi menjadi penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kekotaan wilayah dan hirarki wilayah di Distrik Aimas. Adapun metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder untuk kemudian dianalisis menggunakan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 dan analisis skalogram. Berdasarkan hasil perhitungan, menyatakan kawasan Distrik Aimas terbagi dalam dua golongan tingkat kekotaan yaitu Distrik Mariat Gunung, Distrik Klafma, Distrik Aimas, Distrik Malawili, Distrik Malagusa, Distrik Malaweale, Distrik Malasom, Distrik Mariat Gunung, Distrik Klabinain dan Kampung Maibo sebagai Desa Perkotaan. Kemudian kawasan Distrik Warmon, Kampung Aimo, Kampung Malasaum dan Distrik Klaigit sebagai Desa Perdesaan. Kemudian dari hasil analisis skalogram menyatakan bahwa Distrik Malagusa sebagai pusat pelayanan dan berpotensi sebagai sentral perkembangan fasilitas sosial ekonomi di Distrik Aimas. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan dan pengembangan di Distrik Aimas.

Kata Kunci: Hirarki, Pusat Pelayanan, Tingkat Kekotaan

ABSTRACT

As a developing region, Aimas District as the capital of the Sorong Regency area has challenges regarding the problem of inequality and inequality in the development of socio-economic facilities, so that determining the level of urban areas as well as areas with potential as a center for the development of socio-economic facilities is important to do. The purpose of this study is to determine the level of regional urbanization and regional hierarchy in Aimas District. The method used is to collect primary data and secondary data to then be analyzed using the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency (BPS) in 2020 and scalogram analysis. Based on the calculation results, it is stated that the Aimas District area is divided into two groups at the urban level, namely Mariat Gunung District, Klafma District, Aimas District, Malawili District, Malagusa District, Malaweale District, Malasom District, Mariat Gunung District, Klabinain District and Maibo Village as Urban Villages. Then the Warmon District, Aimo Village, Malasaum Village and Klaigit District as Rural Villages. Then from the results of the scalogram analysis, it is stated that Malagusa District is a service center and has the potential to be a center for the development of socio-economic facilities in Aimas District. The results of the research can be taken into consideration by the government in determining the direction of development and development in Aimas District.

Keywords: Hierarchy, Service Center, Urban Level



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Penggunaan dan kebutuhan lahan pada wilayah kabupaten akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah tersebut. Tidak dapat dipungkiri manusia membutuhkan lahan guna memenuhi kebutuhan hidup. Laju pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, menyebabkan penggunaan lahan permukiman semakin meningkat hal tersebut juga terjadi di wilayah Distrik Aimas. Sehingga dalam perkembangannya kawasan Distrik Aimas semakin menunjukkan eksistensinya sebagai wilayah kekotaan dengan kemajuan dalam aspek pembangunan dan fungsi kota. Distrik Aimas termasuk dalam kawasan perkotaan menurut rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sorong (Revisi RTRW Kabupaten Sorong 2019).

Seiring dengan perkembangan dalam rangka pembangunan yang sedang berlangsung serta maraknya pemekaran, sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Sorong, Distrik Aimas sebagai kawasan perkotaan sehingga wilayah pengembangan kota baru berada di Distrik Aimas sekaligus menjadi Ibu kota Kabupaten dan Pusat pemerintahan. Ibu kota kabupaten harus memiliki fungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah melihat dari sudut kepentingan ekonomi dengan fungsi dan pelayanan

sosial, pemerintah, ekonomi, perdagangan dan jasa, juga wisata budaya dan transportasi wilayah, untuk membina kota-kota kecilnya dalam kabupaten.

Dalam penetapan kawasan strategis provinsi, yang tercantum dalam RTRWP Papua Barat, Kabupaten Sorong tergolong dalam kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan lingkungan hidup. Kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Distrik Aimas dan Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong sebagai kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi dengan fungsi dan kegiatan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, sosial, ekonomi, perdagangan dan jasa, wisata budaya, dan transportasi wilayah. Timbul dilema untuk mendeskripsikan tingkat kekotaan wilayah apakah kawasan kota baru Aimas sudah mencapai tingkat kekotaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sosial yang cepat dan terjangkau.

Fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah terkait atau swasta untuk masyarakat umum. Fasilitas-fasilitas tersebut digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan secara bersama untuk memenuhi kebutuhannya. Tingkat pelayanan fasilitas sosial ekonomi

dipengaruhi keterkaitan spasial daya dan fasilitas itu sendiri dengan atribut-atribut spasial seperti infrastruktur jalan, kondisi topografi dan aspek demografi. Pengaruh atribut-atribut spasial tersebut kenyataannya tidak bersifat individual namun secara menyeluruh dan terpadu (Winardi dan Sugiana, 2005).

Perkembangan merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan potensi suatu wilayah. Jika suatu wilayah mengalami perkembangan maka perkembangan itu akan membawa peran atau imbas pada daerah lainnya. Tingkat perkembangan wilayah umumnya terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu karakteristik wilayah (topografi, kesuburan, aksesibilitas), sumber daya alam, sumber daya manusia serta kebijakan pengolahan lahan wilayah pada daerah tersebut (Zakiyah, 2019).

Pusat pelayanan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (Tarigan 2006: 162). Pusat Pelayanan Kawasan (PKK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Fasilitas perkotaan sebagai tolak ukur tingkat perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pusat

Statistik (BPS) Nomor 120 Tahun 2020, adalah sebagai berikut, Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum, Pasar, Kelompok Pertokoan, Rumah Sakit, Hotel, Bilyar, Diskotek, Panti Pijat dan Salon serta persentase keluarga yang menggunakan telepon kabel, Persentase keluarga yang menggunakan Listrik PLN.

Hammond dalam Rafeal Murto, (1992) bahwa hirarki kota adalah suatu urutan peringkat kota atas dasar ukuran peranan dan fungsinya dalam kaitannya dengan kota-kota lainnya, dengan mengasumsikan pertumbuhan wilayah kota tidak terjadi secara acak namun tumbuh dalam urutan yang logis sehingga baik ukuran maupun fungsinya berkaitan dengan keterkaitan dengan keteraturan menyeluruh. Hirarki kota secara umum dapat dimengerti sebagai peringkat kota berdasar suatu faktor penentu, misalnya jumlah penduduk dan komposisi penggunaan lahan (S.J.Matitaputty dan A.Primadani: 2017).

Contoh klasifikasi hirarki kota atas dasar jumlah penduduknya di kutip dalam buku Klasifikasi Kota oleh Yunus (2005) terdapat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Hirarki Kota Atas Dasar Jumlah Penduduknya

Order atau Nomor Kelas	Notasi Kelas	Perkiraan Jumlah Penduduk
I	Hamlet	16 - < 150

Order atau	Notasi Kelas	Perkiraan Jumlah
II	Village	150 - < 1.000
III	Town	1.000 - < 2.500
IV	Small City	2.500 - < 25.000
V	Medium Sized City	25.000 - < 100.000
VI	Large City	100.000 - < 800.000
VII	Metropolis	800.000 - < indefinite
VIII	Megapolis	indefinite - but at least several millions
IX	Eumenopolis	indefinite - but likely tens of millions

Berdasarkan klasifikasi kota di atas, maka Distrik Aimas termasuk ke dalam klasifikasi Medium sized city orde ke V, yang artinya kota berukuran sedang dengan jumlah penduduknya adalah 42.014 jiwa. Namun masih diperlukan identifikasi lagi untuk mengetahui tingkat kekotaan dengan acuan jumlah fasilitas sosial ekonomi yang terdapat di Distrik Aimas.

Di Indonesia, klasifikasi hirarki kota dengan interval jumlah penduduknya telah dirumuskan. Berdasarkan UU 1965/18 ada tiga klasifikasi hirarki kota atas dasar jumlah penduduknya, yaitu:

Tabel 2. Klasifikasi Hirarki Kota di Indonesia (UU 1965/18)

Order	Nama Kelas	Batas Jumlah Penduduk
1	Kota praja	50.000 - < 75.000
2	Kota madya	75.000 - < 100.000
3	Kota raya	lebih dari 100.000

Sumber: Buku KLASIFIKASI KOTA (Yunus:2005)

Cara tersebut sesungguhnya masih dapat dibuat lebih banyak dengan menggunakan interval lain yang lebih kecil. Salah satu contohnya adalah klasifikasi hirarki beberapa kota atas dasar jumlah

penduduknya dengan interval tertentu di Indonesia yaitu Kota Sabang, Sloko dan Padang panjang penduduknya lebih kecil dari 50.000 orang, dan kota Madiun, Pematang Siantar juga Pekanbaru dengan jumlah penduduk 150.000 sampai kurang dari 200.000 orang (Yunus, 2005: 49).

Utari (2015) mendeskripsikan fasilitas yang digunakan dalam perhitungan skalogram adalah fasilitas yang mencirikan fungsi pelayanan sosial dan ekonomi dengan kriteria obyek tunggal dan terukur serta sedapatnya memiliki karakteristik hirarki atau berjenjang. Metode skalogram adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebaran fungsi fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi serta hirarki pusat pengembangan dan prasarana pembangunan (Muta'ali, 2015: 169). Analisis skalogram menilai fasilitas yang memberikan fungsi baik pelayanansosial maupun pelayanan ekonomi (Apriana dan Rudiarto, 2020).

Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kekotaan wilayah dan hirarki wilayah di Distrik Aimas.

B. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil maksimal dalam penelitian ini akan dibutuhkan data yang mendukung. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari

publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan berupa data jumlah penduduk, data fasilitas pendidikan, peribadatan, kesehatan, dan data jenis pekerjaan penduduk untuk wilayah Distrik Aimas. Subjek pada penelitian ini adalah Distrik Aimas yang kemudian setelah diketahui klasifikasi tingkat perkotaannya dilanjutkan dengan mengidentifikasi hirarki perkotaan dan letak kawasan strategis yang berpotensi menjadi sentral perkembangan fasilitas sosial ekonomi sebagai pusat pelayanan wilayah dari empat belas kelurahan/kampung yang termasuk dalam wilayah Distrik Aimas yaitu Kelurahan Malaweale, Kelurahan Malawili, Kelurahan Aimas, Kelurahan Mariat Pantai, Kelurahan Mariat Gunung, Kelurahan Warmon, Kelurahan Klaigit, Kelurahan Klabinain, Kelurahan Malasom, Kelurahan Malagusa, Kelurahan Klafma, Kampung Aimo, Kampung Maibo dan Kampung Malasaum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kekotaan Berdasarkan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk tertinggi berdasarkan nilai/skor terletak pada wilayah Kelurahan Aimas dengan jumlah skor delapan. Sedangkan nilai/skor terendah terletak pada wilayah Kampung Malasaum dengan jumlah skor satu diikuti dengan

jumlah penduduk sebanyak 133 jiwa. Jumlah analisis nilai/skor kepadatan penduduk disajikan dalam Tabel 3.

2. Analisis Kekotaan Berdasarkan Keluarga Pertanian

Hasil survey dilapangan menjabarkan bahwa hal yang menyebabkan tidak adanya keluarga petani di Wilayah Kelurahan Warmon dan Kampung Maibo adalah kondisi tanah yang dominan rawa sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukannya aktivitas berkebun atau bertani. Pada Tabel 4. Akan di jabarkan hasil nilai/skor berdasarkan dari persentase keluarga pertanian yang ada di Kawasan Distrik Aimas sebelumnya.

Tabel 3. Analisis Nilai/Skor Kepadatan Penduduk di Distrik Aimas

No	Kelurahan/ Kampung	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Nilai/ Skor
1	Malaweale	7531	7
2	Malawili	7142	6
3	Aimas	9068	8
4	Mariat Pantai	2575	4
5	Mariat Gunung	878	2
6	Warmon	840	2
7	Klaigit	703	2
8	Klabinain	1508	3
9	Malasom	5178	5
10	Aimo	352	1
11	Malasaum	133	1
12	Malagusa	3916	4
13	Klafma	1829	3
14	Maibo	361	1
Jumlah		42014	76

Tabel 4. Analisis Nilai/Skor Keluarga Pertanian di Distrik Aimas

No	Kelurahan/ Kampung	Persentase Keluarga Pertanian (%)	Nilai/ Skor
1	Malaweale	2,52	8

No	Kelurahan/ Kampung	Persentase Keluarga Pertanian (%)	Nilai/ Skor
2	Malawili	3,15	8
3	Aimas	1,63	8
4	Mariat Pantai	10,1	6
5	Mariat Gunung	37,59	3
6	Warmon	0	8
7	Klaigit	45,52	3
8	Klabinain	15,58	5
9	Malasom	6,18	7
10	Aimo	42,61	3
11	Malasaum	42,86	3
12	Malagusa	5,11	7
13	Klafma	3,83	8
14	Maibo	0	8
Jumlah			85

Dari Tabel 4. dapat disimpulkan bahwa dua wilayah yang memiliki kondisi tanah dominan rawa tersebut mempunyai nilai/skor yang tinggi tetapi tidak dapat menggambarkan tingkat perkotaannya dari segi jumlah fasilitas sosial ekonomi yang dimiliki.

3. Analisis Kekotaan Berdasarkan Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang ada di Wilayah Distrik Aimas adalah Taman Kanak-Kanak (TK/RA/BA) negeri maupun swasta, SMP Negeri dan Swasta, serta SMA Negeri dan Swasta. Fasilitas pendidikan yang berjarak kurang dari sama dengan dua setengah kilometer mendapat nilai/skor satu, sedangkan wilayah yang tidak memiliki fasilitas pendidikan atau berjarak lebih dari dua setengah kilometer mendapat nilai/skor nol. Pada Tabel 5. akan memperlihatkan hasil analisis perhitungan nilai/skor terhadap fasilitas pendidikan di Kelurahan/Kampung Distrik Aimas.

Tabel 5. Skor Fasilitas Pendidikan di Kelurahan/ Kampung di Distrik Aimas

No	Kelurahan/ Kampung	Fasilitas Pendidikan			Jumlah
		TK	SMP	SMA	
1	Malaweale	1	1	1	3
2	Malawili	1	1	1	3
3	Aimas	1	1	1	3
4	Mariat Pantai	1	1	1	3
5	Mariat Gunung	0	1	0	1
6	Warmon	0	1	0	0
7	Klaigit	1	0	0	1
8	Klabinain	0	0	0	0
9	Malasom	1	1	1	3
10	Aimo	0	0	0	0
11	Malasaum	0	0	0	0
12	Malagusa	1	1	1	3
13	Klafma	1	1	0	2
14	Maibo	0	0	0	0

Dari Tabel 5. di atas, diketahui bahwa Kelurahan Warmon, Kampung Aimo, Kampung Malasaum dan Kampung Maibo tidak memiliki fasilitas pendidikan dan juga jarak yang jauh (terhitung dari kantor kelurahan/kampung) sehingga nilai/skor yang diperoleh adalah nol.

4. Analisis Kekotaan Berdasarkan Fasilitas Ekonomi

Fasilitas ekonomi yang berada di Wilayah Distrik Aimas antara lain: pasar, pertokoan, dan hotel/bilyar/pub/diskotek/tempat karaoke/salon dimana wilayah yang berjarak lebih dari dua kilometer dan tidak memiliki fasilitas ekonomi di beri skor nol. Sedangkan wilayah yang memiliki fasilitas ekonomi di beri skor satu. Pada Tabel 6. akan memperlihatkan hasil analisis perhitungan nilai/skor terhadap fasilitas ekonomi di Kelurahan/Kampung Distrik Aimas.

Tabel 6. Analisis Nilai/Skor Fasilitas Ekonomi di Kelurahan/Kampung di Distrik Aimas

No	Kelurahan/ Kampung	Fasilitas Ekonomi			Skor
		Pasar	Toko	Hotel/ Salon	
1	Malaweke	1	1	1	3
2	Malawili	1	1	1	3
3	Aimas	0	1	1	3
4	Mariat Pantai	1	1	1	3
5	Mariat Gunung	0	1	0	1
6	Warmon	0	1	0	0
7	Klaigit	0	0	0	1
8	Klabinain	0	0	0	0
9	Malasom	1	1	1	3
10	Aimo	0	0	0	0
11	Malasaum	0	0	0	0
12	Malagusa	1	1	1	3
13	Klafma	1	1	0	2
14	Maibo	0	0	0	0

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa kawasan yang berjarak dekat dan memiliki fasilitas ekonomi ialah Kelurahan Malaweke, Kelurahan Malawili, Kelurahan Mariat Pantai, Kelurahan Malasom, dan Kelurahan Malagusa yang memiliki total skoring tiga dari masing-masing wilayah.

5. Analisis Kekotaan Berdasarkan Fasilitas Kesehatan

Pada Tabel 7 akan di jabarkan nilai skoring dari fasilitas kesehatan yang ada di Kawasan Distrik Aimas.

Tabel 7. Analisis Nilai/Skor Fasilitas Kesehatan di Kelurahan/ Kampung di Distrik Aimas

No	Kelurahan/ Kampung	Rumah sakit dan RS Bersalin	Nilai/ Skor
1	Malaweke	Ada atau ≤ 5 km	1
2	Malawili	Ada atau ≤ 5 km	1
3	Aimas	Ada atau ≤ 5 km	1
4	Mariat Pantai	Ada atau ≤ 5 km	1
5	Mariat Gunung	Tidak ada	0
6	Warmon	Tidak ada	0
7	Klaigit	Tidak ada	0
8	Klabinain	Tidak ada	0
9	Malasom	Ada atau ≤ 5 km	1
10	Aimo	Tidak ada	0

No	Kelurahan/ Kampung	Rumah sakit dan RS Bersalin	Nilai/ Skor
11	Malasaum	Tidak ada	0
12	Malagusa	Ada atau ≤ 5 km	1
13	Klafma	Ada atau ≤ 5 km	1
14	Maibo	Tidak ada	0

Dari Tabel 7. diatas, diperoleh persentase wilayah yang memiliki atau berada kurang dari sama dengan 5km terhadap fasilitas kesehatan berupa Rumah Sakit dan Rumah Sakit Bersalin serta wilayah yang tidak memiliki atau berada jauh dari fasilitas kesehatan adalah masing-masing lima puluh persen.

6. Analisis Kekotaan Berdasarkan Persentase Keluarga Pengguna Listrik PLN dan Keluarga Pengguna Telepon Kabel

Pada gambar 1 akan dijabarkan nilai skoring dari persentase keluarga pengguna listrik PLN dan persentase keluarga pengguna telepon kabel di Kawasan Distrik Aimas.

No	Kelurahan/kampung	Nilai/Skor		Jumlah
		Persentase Keluarga Pengguna Listrik PLN	Persentase Keluarga Pengguna Telepon Kabel	
1	Kelurahan Malaweke	1	0	1
2	Kelurahan Malawili	1	0	1
3	Kelurahan Aimas	1	0	1
4	Kelurahan Mariat Pantai	1	0	1
5	Kelurahan Mariat Gunung	1	0	1
6	Kelurahan Warmon	1	0	1
7	Kelurahan Klaigit	1	0	1
8	Kelurahan Klabinain	1	0	1
9	Kelurahan Malasom	1	0	1
10	Kampung Aimo	1	0	1
11	Kampung Malasaum	1	0	1
12	Kelurahan Malagusa	1	0	1
13	Kelurahan Klafma	1	0	1
14	Kampung Maibo	1	0	1

Gambar 1. Analisis Nilai/Skor Persentase Keluarga Pengguna Listrik PLN dan Keluarga Pengguna Telepon Kabel

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa seluruh Wilayah Distrik Aimas mendapatkan fasilitas listrik PLN dan juga persentase keluarga pengguna telepon kabel tidak lebih dari sama dengan dua persen jumlah penduduk yang ada pada masing-masing kelurahan/kampung.

7. Analisis Tingkat Kekotaan di Distrik Aimas Kabupaten Sorong

Berdasarkan Jumlah Fasilitas Sosial Ekonomi

Setelah dilakukan analisis skoring pada beberapa fasilitas yang ada di Distrik Aimas, selanjutnya akan dikalkulasikan hasil dari jumlah skoring dari masing-masing kelurahan/kampung untuk menentukan tingkat kekotaan. Hasil nilai/skor yang diperoleh akan dijabarkan pada gambar 2 sebagai berikut.

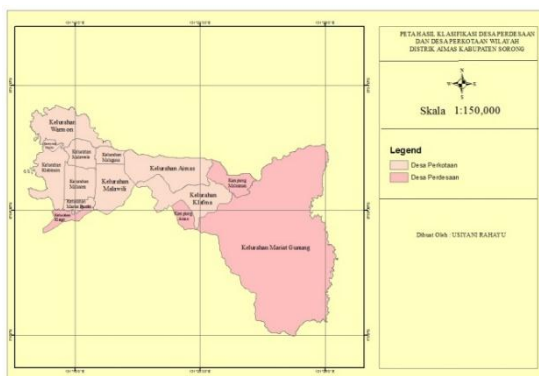
No	Kelurahan/kampung	Jumlah Nilai/skor Dari Tiap Unit Fasilitas Perkotaan						Total	Klasifikasi
		Kepadatan Penduduk	Persentase Keluarga Pertanian	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Kesehatan	Persentase Keluarga Pengguna Listrik PLN dan Telepon Kabel	Fasilitas Ekonomi		
1	Kelurahan Malawele	7	8	3	1	1	3	23	DESA PERKOTAAN
2	Kelurahan Malawili	6	8	3	1	1	3	22	DESA PERKOTAAN
3	Kelurahan Aimas	8	8	3	1	1	2	23	DESA PERKOTAAN
4	Kelurahan Mariat Pantai	4	6	3	1	1	3	18	DESA PERKOTAAN
5	Kelurahan Mariat Gunung	2	3	1	0	1	0	7	DESA PERDESAAN
6	Kelurahan Warmon	2	8	0	0	1	0	11	DESA PERKOTAAN
7	Kelurahan Klaigit	2	3	1	0	1	0	7	DESA PERDESAAN
8	Kelurahan Klabinain	3	5	1	0	1	0	10	DESA PERKOTAAN
9	Kelurahan Malasom	5	7	3	1	1	3	20	DESA PERKOTAAN
10	Kampung Aimo	1	3	0	0	1	0	5	DESA PERDESAAN
11	Kampung Malasaum	1	3	0	0	1	0	5	DESA PERDESAAN
12	Kelurahan Malagusa	4	7	3	1	1	3	19	DESA PERKOTAAN
13	Kelurahan Klafma	3	8	2	1	1	1	16	DESA PERKOTAAN
14	Kampung Maibo	1	8	0	0	1	0	10	DESA PERKOTAAN

Gambar 2. Jumlah Nilai/Skor Dari Perhitungan Tingkat Kekotaan Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020

Dari hasil penelitian tingkat kekotaan Wilayah Distrik Aimas dapat diketahui masih terdapat daerah yang tergolong Desa Perdesaan yaitu Kawasan Kelurahan Mariat Gunung, Kelurahan Kaligit, Kampung Aimo, dan Kampung Malasaum. Hasil yang diperoleh disimpulkan belum maksimal jika dilihat berdasarkan kondisi di lapangan langsung. Dimana jumlah fasilitas sosial ekonomi sebagai pokok penelitian yang terdapat di Kelurahan Warmon dan Kampung Maibo yang telah diklasifikasikan sebagai Desa Perkotaan,

masih jauh dari lengkap namun memperoleh nilai/skor lebih dari sama dengan Sembilan.

Oleh sebab itu dilakukan Kembali analisis kotaan berdasarkan jumlah fasilitas sosial ekonomi yang terdapat di masing-masing kelurahan/kampung di Kawasan Distrik Aimas, yaitu analisis skalogram untuk mengetahui pusat-pusat pelayanan dan wilayah yang berpotensi menjadi sentral perkembangan fasilitas sosial ekonomi di Distrik Aimas.



Gambar 3. Peta Hasil Kasifikasi Desa Perkotaan dan Desa Perdesaan Distrik Aimas

Pada gambar diatas ini merupakan peta klasifikasi desa perkotaan dan desa perdesaan dari hasil analisis berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020.

8. Hirarki Wilayah dan Pusat Pelayanan di Distrik Aimas

Pada analisis ini dilakukan perhitungan kelayakan analisis skalogram, lalu dilakukan interpretasi data untuk mendapatkan nilai error sehingga

diketahui nilai kelayakannya. Penelitian ini menilai fasilitas yang memberikan fungsi baik pelayanan sosial maupun pelayanan ekonomi (Apriana dan Rudiarto, 2020).

Tabel 8. Daftar Jenis Fasilitas Pelayanan di Distrik Aimas

No	Jenis Fasilitas	No	Jenis Fasilitas
1	TK/RA	12	UMKM
2	SD/MI	13	Hotel
3	SMP/MTS	14	Bank
4	SMA/MA/SMK	15	Pelabuhan
5	Universitas	16	Rumah Sakit
6	Masjid	17	Rumah Bersalin
7	Musholah	18	Puskesmas
8	Gereja	19	Poliklinik
9	Vihara	20	Posyandu
10	Pura	21	Polindes
11	Industri Besar	22	Pasar

Pada analisis skalogram asumsi yang digunakan adalah wilayah yang memiliki fasilitas paling lengkap merupakan hirarki tertinggi dan ditetapkan sebagai pusat pelayanan yang berpotensi menjadi kawasan sentral perkembangan fasilitas sosial ekonomi di Distrik Aimas.

Lalu dilakukan interpretasi data jumlah fasilitas sosial ekonomi pada masing-masing kelurahan/kampung di Distrik Aimas dan menghitung kelayakan skalogram. Setelah memperoleh jumlah error, perhitungan dilanjutkan bertujuan untuk mengetahui apakah data yang ada layak digunakan untuk menghitung skalogram. Berdasarkan hasil perhitungan kelengkapan fasilitas masing-masing

kelurahan/kampung terdapat jumlah error sama dengan 75 (tujuh puluh lima).

Berdasarkan hasil dari perhitungan COR diperoleh hasil 0,96 yang berarti data yang dimiliki layak untuk dianalisis. Kemudian, kelurahan/kampung akan diurutkan berdasarkan kelengkapan fasilitas sosial ekonominya. Jumlah hirarki yang diperoleh adalah 5 (lima), dengan panjang kelas nya adalah 2,8 sehingga pembagian hirarkinya adalah sebagai berikut:

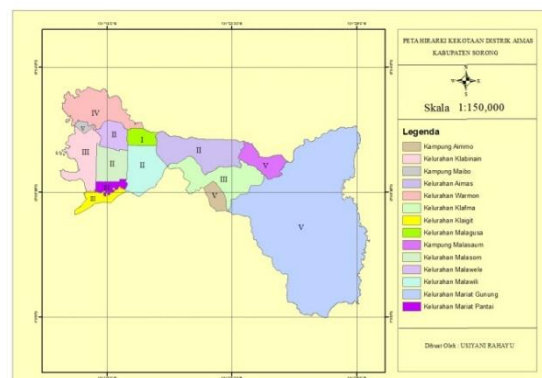
- Hirarki I = 14,3 – 17
- Hirarki II = 11,5 – 14,2
- Hirarki III = 8,7 – 11,4
- Hirarki IV = 5,9 – 8,6
- Hirarki V = 3 – 5,8

Berdasarkan perhitungan analisis skalogram, hirarki dari tiap-tiap kelurahan/kampung di Distrik Aimas adalah sebagai berikut

Tabel 9. Hasil Perhitungan Analisis Skalogram Berdasarkan Kelengkapan Fasilitas Sosial Ekonomi di Distrik Aimas

No	Kelurahan/ Kampung	Jumlah	Hirarki
1	Malawele	17	I
2	Malawili	14	II
3	Aimas	12	II
4	Mariat Pantai	12	II
5	Mariat Gunung	12	II
6	Warmon	11	III
7	Klaigit	9	III
8	Klabinain	8	III
9	Malasom	8	III
10	Aimo	6	IV
11	Malasaum	5	V
12	Malagusa	4	V
13	Klafma	3	V
14	Maibo	3	V

Dari hasil analisis skalogram diketahui bahwa Kelurahan Malagusa berada pada hirarki satu dengan jumlah unit fasilitas paling lengkap. Kelurahan Malagusa ditetapkan sebagai pusat pelayanan serta berpotensi menjadi sentral perkembangan Fasilitas Sosial Ekonomi di Distrik Aimas.



Gambar 4. Peta Hasil Hirarki Wilayah Distrik Aimas Menurut Analisis Skalogram

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan menggunakan dua metode analisis yaitu klasifikasi tingkat kekotaan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 dan metode analisis skalogram, dapat diketahui kondisi kekotaan Wilayah Distrik Aimas sebagai Ibukota Kabupaten Sorong yang sebagian besar daerahnya adalah desa perkotaan. Menurut analisis skalogram, wilayah kelurahan/kampung yang memiliki fasilitas sosial ekonomi paling lengkap adalah daerah pusat pelayanan dan sangat berpotensi menjadi daerah sentral perkembangan fasilitas

sosial ekonomi yang tentunya sangat menguntungkan dari segi financial. Kelurahan Malagusa menjadi daerah Hirarki I dalam tingkatan wilayah di Distrik Aimas berdasarkan analisis skalogram.

Distrik Aimas berpotensi untuk berkembang dalam sektor sosial ekonomi seiring dengan banyaknya pembangunan pertokoan yang sedang marak dilakukan. Semakin lengkap fasilitas sosial ekonomi yang dimiliki suatu daerah, akan meningkatkan kekuatan interaksi terhadap daerah lain disekitarnya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa klasifikasi daerah desa perdesaan dan desa perkotaan menurut Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan empat kawasan di Distrik Aimas yang masih tergolong sebagai desa perdesaan yaitu, Kelurahan Mariat Gunung, Kelurahan Klait, Kampung Aim, dan Kampung Malasaum. Selebihnya merupakan daerah desa perkotaan dengan klasifikasi desa perkotaan yaitu Kelurahan Malawe, Kelurahan Malawili, Kelurahan Aimas, Kelurahan Mariat Pantai, Kelurahan Warmon, Kelurahan Malasom, Kelurahan Klabiain, Kampung Maibo, Kelurahan Malagusa, dan Kelurahan Klafma. (2)

analisis skalogram pada kelurahan/kampung di Distrik Aimas menunjukkan Kelurahan Malagusa sebagai hirarki tertinggi yang merupakan wilayah dengan unit fasilitas paling lengkap dan berpotensi menjadi daerah setral perkembangan fasilitas sosial ekonomi di Distrik Aimas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2019). Aimas dalam Angka 2019.
- Badan Pusat Statistik (2021). Aimas dalam Angka 2021.
- Alarico Da Costa, dkk, 2019. Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman Kabupaten Sorong. Jurnal Spasial: Universitas Sam Ratulangi.
- Apriana M. dan Rudiarto I. (2020). Penentuan Pusat Pelayanan Perkotaan di Kota Tanjung Pinang.
- Dewi Sartika, 2018. Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Fasilitas Sosial di Pinggiran Kota Kabupaten Pinrang. (Studi Kasus: Kawasan Perkotaan Tiroang Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang). [Skripsi]. Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudding Makassar.
- Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sorong. 2022. Data Konsolidasi Bersih (DKS) Kependudukan Menurut Struktur Pekerjaan.
- Hadi Sabari Yunus (2005). Klasifikasi Kota By Hadi Sabari Yunus. (PP 45-55).
- Rustan, A., & Cangara, H. (2011). Perilaku Komunikasi Orang Bugis dari Perspektif Islam. KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi, 91-106.
- Lavey dan Lombo, 1973. Liberalism, Politics, and Health Planning. *Jurnal of Health and Human Resources Administration*.
- Nur Afrianty Adjauhar, 2014. Kajian Fungsi Kawasan Distrik Aimas Kabupaten

- Sorong Propinsi Papua Barat. [Skripsi]. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- PopiSopiantin, 2010. Menejemen belajar berbasis kepuasan siswa. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Revisi RTRW Kabupaten Sorong 2019.
- Tekege dan Murti, 2015. Efektifitas Pelayanan Publik di Distrik Sorong Kabupaten, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat. Jurnal Penelitian Administrasi Publik 1.
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tentang Perbankan.
- Utari, E. S. (2015). Analisis Sistem Pusat Pelayanan Permukiman Di Kota Yogyakarta Tahun 2014.
- Winardi dan Kawik S. 2005. Analisis Pelayanan Fasilitas Sosial dan Ekonomi di Kecamatan Pituruh dan Krcamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Thesis.
- Zakiah, dkk, 2019. Analisis Spasial Tingkat Perkembangan Wilayah Perkotaan Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. S2 Thesis, Program Pascasarjana.